



**ANALISIS YURIDIS PEMERIKSAAN SAKSI MAHKOTA
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN
NEGERI SEMARANG (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR :
94/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh
EMIR ABRAHAM
111211010

**PROGRAM STUDI SI ILMU HUKUM
FAKULTAS EKONOMI, HUKUM DAN HUMANIORA UNIVERSITAS
NGUDI WALUYO**

2025



**ANALISIS YURIDIS PEMERIKSAAN SAKSI MAHKOTA
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN
NEGERI SEMARANG (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR :
94/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh
EMIR ABRAHAM

111211010

**PROGRAM STUDI SI ILMU HUKUM FAKULTAS EKONOMI, HUKUM
DAN HUMANIORA UNIVERSITAS NGUDI WALUYO 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul:

**ANALISIS YURIDIS PEMERIKSAAN SAKSI MAHKOTA DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI
SEMARANG (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR : 94/Pid.Sus-
TPK/2019/PN Smg)**

Oleh

EMIR ABRAHAM

111211010

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS EKONOMI, HUKUM DAN HUMANIORA UNIVERSITAS
NGUDI WALUYO
2025**

Telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing serta telah diperkenankan untuk
diujikan

Ungaran, 7 Januari 2025

Pembimbing Skripsi

Dr. Arista Candra Irawati, SH.,MH.Adv

NIDN.0609077101

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi Berjudul:

**ANALISIS YURIDIS PEMERIKSAAN SAKSI MAHKOTA DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI
SEMARANG (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR : 94/Pid.Sus-**

TPK/2019/PN Smg)


Oleh
EMIR ABRAHAM
111211010

Telah dipertahankan di depan tim penguji proposal Program Studi SI Ilmu Hukum
Fakultas Ekonomi, Hukum dan Humaniora, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 17 April 2025

Tim Penguji: Ketua Tim Penguji


Indra Yuliawan, S.H., M.H.
NIDN. 0614077603

Anggota / Penguji I


Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum
NIDK.8991201024

Anggota / Penguji II



Dr. Arista Candra Irawati, S.H., M.H., Adv
NIDN/ 0610066102

**Dekan Fakultas Ekonomi, Hukum,
dan Humaniora**



Budiat, S.Pd., M.Pd.
0607038201

Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Indra Yuliawan, S.H., M.H.
0614077603

KEASLIAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : EMIR ABRAHAM

NIM : 111211010

Program Studi/Fakultas : SI Ilmu Hukum/Ekonomi Hukum dan
Humaniora.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi berjudul “**ANALISIS YURIDIS PEMERIKSAAN SAKSI MAHKOTA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR : 94/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg)**” adalah karya ilmiah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik apapun di Perguruan Tinggi manapun.
2. Skripsi ini merupakan ide dan hasil karya murni saya yang dibimbing dan dibantu oleh tim pembimbing dan narasumber.
3. Skripsi ini tidak memuat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan kecuali secara tertulis dicantumkan dalam naskah sebagai acuan dengan menyebut nama pengarang dan judul aslinya serta dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran di dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh dan saksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Ngudi Waluyo.

Semarang, 10 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan,



EMIR ABRAHAM

KESEDIAAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EMIR ABRAHAM
NIM : 111211010
Prodi : S1 Ilmu Hukum
Fakultas : Ekonomi, Hukum dan Humaniora
Jenis Karya Ilmiah : Skripsi

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PEMERIKSAAN
SAKSI MAHKOTA DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG
(STUDI
KASUS : PUTUSAN NOMOR : 94/Pid.Sus-TPK/2019/PN
Smg).

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju untuk :

1. Memberikan hak bebas *royalty*/pemberian dana kepada Universitas Ngudi Waluyo atas penulisan karya ilmiah saya demi pengembangan disiplin ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak untuk menyimpan dan mempublikasi, tanpa meminta lagi persetujuan dari saya selama mencantumkan nama saya sebagai pembuat karya ilmiah ini.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Ngudi Waluyo, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini. Demikian surat keterangan pernyataan publikasi ini saya buat dengan sadar dan semoga dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Semarang, 10 Februari 2025

Peneliti.



EMIR ABRAHAM
NIM. 111211010

HALAMAN MOTTO

“Sebisa mungkin, tetaplah diam atau jaga percakapanmu seperlunya saja”

(EPIKETOS)

Universitas Ngudi Waluyo
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi, Hukum dan Humaniora
Skripsi, Februari 2025
EMIR ABRAHAM111211010

**ANALISIS YURIDIS PEMERIKSAAN SAKSI MAHKOTA DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI
SEMARANG (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR : 94/Pid.Sus-
TPK/2019/PN Smg)
ABSTRAK**

Saksi mahkota mengakibatkan kedudukan terdakwa menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya, sehingga menyebabkan pro dan kontra. Pengaturan dari saksi mahkota tidak ditemukan dalam aturan umum, melainkan dapat ditemukan dalam peraturan khusus. Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah pertama, bagaimana pengaturan mengenai pemeriksaan saksi mahkota berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia; kedua, bagaimana peran saksi mahkota dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 94/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam menyusun penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian dideskripsikan menggunakan metode deskriptif analitis. Sumber data diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan terhadap data primer, sekunder, dan tersier. Data yang telah diperoleh akan dianalisis dan diolah dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, sehingga memudahkan penyusunan penulisan hukum ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa pengaturan mengenai saksi mahkota. Saksi mahkota diperbolehkan bilamana pembuktian sulit. Saksi mahkota sebaiknya tidak dilakukan karena bertentangan dengan aturan umum dan merugikan terdakwa. Saksi mahkota dapat dilakukan setelah memenuhi syarat tertentu. Hak dan kewajiban terdakwa berubah sementara saat dijadikan sebagai saksi mahkota.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah saksi mahkota dilakukan bilamana terjadinya kebuntuan dalam tindak pidana yang pembuktiannya sulit saja, sehingga cukup diatur secara khusus. Pemeriksaan saksi mahkota harus memperhatikan syarat-syarat suatu perkara tindak pidana dapat ajukan saksi mahkota. Hak dan kewajiban terdakwa yang tercederai karena pemeriksaan saksi mahkota, oleh karena itu diperlukan adanya pemberian peringanan terhadap terdakwa yang dijadikan sebagai saksi mahkota.

Kata Kunci : Saksi Mahkota; Pembuktian; Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

Crown witness is used to proving certain crimes that are difficult to solve. Crown witness affects a defendant's position as a witness for other defendants, so that's why it causes some pros cons. There's no crown witness' regulation on common rules, but there are some crown witness' regulations on special rules. The problems of this law research are how is crown witness regulated based on Indonesian Law, and how is crown witness used to prove corruption case based on court sentence number: 94/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg.

The research methodology that's being used is a normative juridical approach. The result of the research will be described by using an analytical descriptive method. Data sources were obtained by using library research on primary data, secondary data, and tertiary data. All data that's been gathered will be analyzed by using qualitative analysis techniques.

The results of the research that been done, shows some points about the crown witness. Crown witness is used to proving certain crimes that are difficult to solve. Crown witness isn't prohibited, but as small as possible we don't use crown witness. Crown witness will be able to use when some cases fulfill some terms.

Defendant's rights dan obligations are changed for a while.

The conclusion is a crown witness is used to prove certain crimes that are difficult to solve, so that's why it needs special rules. We must put attention to crown witness terms before using them. A defendant that used to be crown witness needs some reward.

Keywords: Crown witness; proofing; corruption.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta nikmat sehat wal afiat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "ANALISA YURIDIS PEMERIKSAAN SAKSI MAHKOTA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR : 94/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg)" ini dapat diselesaikan. Penulis sangat mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini, atas bantuan, arahan dan motivasi yang senantiasa diberikan selama ini, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Subyantoro, M.Hum, Selaku Rektor Universitas Ngudi Waluyo.

2. Budiati, S.Pd., M.Pd. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Hukum dan Humaniora.
3. Indra Yuliawan, S.H. M.H., selaku etua Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Ngudi WaluyoFakultas Ekonomi, Hukum dan Humaniora.
4. Dr. Arista Candra Irawati, S.H. MH.Adv, selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dosen Program Studi SI Ilmu Hukum Universitas Ngudi Waluyo yang telah banyak membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
6. Bapak, Ibu, dan adik penulis atas segala hal yang telah diperbuat untuk kehidupan penulis, segala perjuangan serta doanya yang tak pernah terhenti untuk penulis yang tak akan pernah bisa tergantikan oleh siapa pun.
7. Kakek dan Nenek penulis atas segala semangat, masukan, dan doa yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

Peneliti dengan senang hati menerima saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi sempurnanya penelitian selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, 18 Februari 2025



Peneliti

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	i
SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
KEASLIAN TUGAS AKHIR	iv
KESEDIAAN PUBLIKASI.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Teori	15
1. Tindak Pidana Korupsi	15
2. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Error! Bookmark not defined.	
3. Proses Persidangan Di Pengadilan Error! Bookmark not defined.	
4. Alat Bukti Persidangan	Error! Bookmark not defined.
5. Kedudukan Saksi Dalam Persidangan.....	26
6. Urgensi Saksi Mahkota Dalam Persidangan	27
B. Kerangka Teoritis	31
C. Kerangka Konsep.....	37
D. Hipotesis	37
BAB III METODE PENELITIAN	

A.	Metode Pendekatan	39
B.	Spesifikasi Penelitian	39
C.	Sumber Data	39
D.	Teknik Pengumpulan Data	40
E.	Teknik Analitis Data	41
F.	Latar Penelitian	41
G.	Fokus Penelitian	42
H.	Teknik Keabsahan Data	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		46
A.	Pengaturan Mengenai Pemeriksaan Saksi Mahkota Berdasarkan Ketentuan Hukum di Indonesia	46
1.	Analisis Pengaturan Pemeriksaan Saksi Mahkota Berdasarkan Ketentuan Hukum di Indonesia	46
2.	Perbandingan Penerapan <i>Justice Collaborator</i> , <i>Whistleblower</i> , dan Saksi Mahkota	71
B.	Peran Saksi Mahkota dalam Proses Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 94/Pid.Sus- TPK/2019/PN Smg.	75
1.	Analisis Kasus Posisi	75
2.	Peran Saksi Mahkota	83
3.	Hak dan Kewajiban Saksi Mahkota	85
BAB V PENUTUP		93
A.	Simpulan	93
B.	Saran	94
DAFTAR PUSTAKA		96

